

TATA CARA PEMBAGIAN – PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN BURU TAHUN ANGGARAN 2016

2016

PERBUP BURU NO. 17, BD. 2016/NO.17 : 7 HLM.

PERATURAN BUPATI BURU TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN BURU TAHUN ANGGARAN 2016

- ABSTRAK :**
- Berdasarkan Pasal 12 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Penetapan rincian Dana Desa untuk setiap desa dihitung berdasarkan Alokasi Dasar secara merata untuk seluruh wilayah di Indonesia dan alokasi yang memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis setiap desa.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No. 46 Tahun 1999; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 6 Tahun 2014; PP No. 22 Tahun 2015; PP No. 47 Tahun 2015; PEPRES No. 137 Tahun 2015; PERMENDAGRI No. 113 Tahun 2014; PERMENDESPEMDATRANS No. 21 Tahun 2015; PERDAKABBURU No. 12 Tahun 2015; PERDAKABBURU No. 16 Tahun 2015; PERBUPBURU No. 60 Tahun 2015.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Rincian Dana Desa untuk setiap desa di Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2016 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan alokasi dasar dan alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan indeks kesulitan geografis desa setiap kabupaten.

- CATATAN :**
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 14 Januari 2016;
 - Lampiran 2 hlm.

PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA KABUPATEN BURU TAHUN ANGGARAN 2016

2016

PERBUP BURU NO. 18, BD. 2016/NO. 18 : 13 HLM.

PERATURAN BUPATI BURU TENTANG PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA KABUPATEN BURU TAHUN ANGGARAN 2016

- ABSTRAK :**
- Berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat (1) huruf d dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, salah satu Sumber Pendapatan Desa berasal dari Alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten. Berdasarkan Pasal 96 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dimana ketentuan mengenai pengalokasian Alokasi Dana Desa (ADD) dan pembagian ADD kepada setiap desa diatur dengan Peraturan Bupati.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No. 46 Tahun 1999; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 6 Tahun 2014; PP No. 22 Tahun 2015; PP No. 47 Tahun 2015; PERMENDAGRI No.113 Tahun 2014; PERMENDESPEMDATRANS No. 21 Tahun 2015; PERDAKABBURU No. 12 Tahun 2015; PERDAKABBURU No. 16 Tahun 2015; PERDAKABBURU No. 60 Tahun 2015.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Pedoman Umum Pelaksanaan Alokasi Dana Desa, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
- CATATAN :**
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 14 Januari 2016;
 - Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati;
 - Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Buru Nomor

06 Tahun 2014 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2014 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

PEDOMAN TEKNIS PENGGUNAAN – PENGELOLAAN DANA DESA DI KABUPATEN BURU TAHUN ANGGARAN 2016

2016

PERBUP BURU NO. 19, BD. 2016/NO. 19 : 19 HLM.

PERATURAN BUPATI BURU TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGGUNAAN DAN PENGELOLAAN DANA DESA DI KABUPATEN BURU TAHUN ANGGARAN 2016

- ABSTRAK :**
- Berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2015 salah satu sumber Pendapatan Desa berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati/Walikota dapat membuat pedoman teknis penggunaan Dana Desa tersebut.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No. 46 Tahun 1999; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 22 Tahun 2015; PP No. 47 Tahun 2015; PERMENDAGRI No. 113 Tahun 2014; PERMENDESPEMDATERTRANS No. 21 Tahun 2015; PERDAKABBURU No. 12 Tahun 2015; PERDAKABBURU No. 16 Tahun 2015; PERBUPBURU No. 60 Tahun 2015.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Pedoman Teknis Penggunaan dan Pengelolaan Dana Desa, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.
- CATATAN :**
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 14 Januari 2016;
 - Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

2016

PERBUP BURU NO. 23, BD. 2016/NO. 23 : 4 HLM.

PERATURAN BUPATI BURU TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

- ABSTRAK :**
- Berdasarkan Pasal 155 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, peninjauan terhadap tariff retribusi ditetapkan dengan Peraturan Kepala daerah. Tarif sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipandang tidak sesuai lagi dengan perkembangan ekonomi saat ini, sehingga perlu dilakukan penyesuaian.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 46 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 22 Tahun 2009; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 55 Tahun 2012; PP No. 69 Tahun 2010; PERDAKABBURU No. 19 Tahun 2011; PERDAKABBURU No. 03 Tahun 2015.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Perubahan Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor pada Pasal 8.

- CATATAN :**
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 27 Januari 2015.

PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

2016

PERBUP BURU NO. 28, BD. 2016/NO. 28 : 3 HLM.

PERATURAN BUPATI BURU TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

- ABSTRAK :**
- Berdasarkan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah, peninjauan terhadap tariff retribusi ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. Tarif sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Peraturan daerah Kabupaten Buru Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dipandang tidak sesuai lagi dengan perkembangan ekonomi saat ini, sehingga perlu dilakukan penyesuaian.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No. 28 Tahun 1999; UU No.46 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No.33 Tahun 2004; UU No. 22 Tahun 2009; UU No. 28 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014; PP No.58 Tahun 2005; PP No.69 Tahun 2010; PP No.55 Tahun 2012; PERDAKABBURU No. 17 Tahun 2011; PERDAKABBURU No. 03 Tahun 2015.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, dengan menetapkan perubahan pada Pasal 8.

- CATATAN :**
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 27 Januari 2016;

**PENETAPAN TARIF PAJAK NILAI SEWA REKLAME - PENETAPAN REKLAME TAHUNAN
2016**

PERBUP BURU NO. 29, BD. 2016/NO. 29 : 8 HLM.

**PERATURAN BUPATI BURU TENTANG PENETAPAN TARIF PAJAK NILAI SEWA
REKLAME DAN PENETAPAN REKLAME TAHUNAN**

ABSTRAK :

- Berdasarkan Pasal 5 ayat (6) Peraturan daerah Kabupaten Buru Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame. Penetapan harga dasar pengenaan Pajak Nilai Sewa Reklame dan Penetapan Reklame Tahunan dimaksudkan sebagai dasar untuk dilakukan pungutan Pajak Reklame.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 46 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 3 Tahun 2010; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 58 Tahun 2005; PERDAKABBURU No. 6 Tahun 2011; PERDAKABBURU No. 6 Tahun 2012; PERDAKABBURU No. 16 Tahun 2015; PERDAKABBURU No. 60 Tahun 2015.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Penetapan Tarif Pajak Nilai Sewa Reklame dan Penetapan Reklame Tahunan, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Pajak Reklame yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi yang dilakukan oleh/orang pribadi atau badan penyelenggara reklame kepada daerah dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung yang dapat dipaksskan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

CATATAN :

- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 29 Januari 2016;
- Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Buru Nomor 16 Tahun 2013 tentang Penetapan Besarnya Tarif Pajak Reklame (Berita Daerah Kabupaten Buru Tahun 2013 Nomor 16) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BURU NOMOR 65 TAHUN 2014 – STANDAR PELAYANAN PERIZINAN – NON PERIZINAN PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN DI KABUPATEN BURU

2016

PERBUP BURU NO. 31, BD. 2016/NO. 31 : 6 HLM.

PERATURAN BUPATI BURU TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BURU NOMOR 65 TAHUN 2014 TENTANG STANDAR PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN DI KABUPATEN BURU

- ABSTRAK :**
- Dalam rangka memudahkan Implementasi Peraturan Bupati Buru Nomor 65 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Kabupaten Buru.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No. 46 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 65 Tahun 2005; PP No. 41 Tahun 2007; PP No. 19 Tahun 2008; PERMENDAGRI No. 4 Tahun 2010; PERMENPANRB No. 36 Tahun 2012; PERMENDAGRI No. 138-270 Tahun 2010; PERDAKABBURU No. 26 Tahun 2008; PERDAKABBURU No. 01 Tahun 2015; PERDAKABBURU No. 12 Tahun 2012; PERBUPBURU No. 42 Tahun 2008.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Perubahan Lampiran I dan II Peraturan Bupati Buru Nomor 65 Tahun 2014.
- CATATAN :**
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 04 Februari 2016.

TATACARA PERGESERAN ANGGARAN – SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

2016

PERBUP BURU NO. 34, BD. 2016/NO. 34 : 8 HLM.

PERATURAN BUPATI BURU TATACARA PERGESERAN ANGGARAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

ABSTRAK : – Untuk menyesuaikan pelaksanaan anggaran dalam tahun berjalan dengan perubahan kebutuhan dan percepatan kinerja, serta untuk meningkatkan system penganggaran pendapatan dan belanja daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selaras sesuai ketentuan Pasal 160 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

– Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No. 46 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 39 Tahun 2007; PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006; PERDAKABBURU No. 10 Tahun 2012; PERDAKABBURU No. 12 Tahun 2015.

– Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Tata Cara Pergeseran Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Anggaran untuk kegiatan/jenis/obyek/rincian obyek yang mengalami pergeseran, tidak dapat direalisasikan sebelum diterbitkannya SPD sebagai dasar pelaksanaan pengeluaran kas.

CATATAN : – Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 21 April 2016;

– Belanja yang dianggarkan pada kode rekening obyek Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Hibah Barang/Jasa, dan Belanja Sosial berupa barang yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga, dikecualikan dari ketentuan dalam Peraturan Bupati ini, dan tidak boleh dilakukan pergeseran maupun perubahan selama tahun anggaran berjalan;

– Lampiran 3 hlm.

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BURU NOMOR 20 TAHUN 2014 –
BIAYA SEWA ALAT BERAT MILIK PEMERINTAH KABUPATEN BURU**

2016

PERBUP BURU NO. 36, BD. 2016/NO. 36 : 4 HLM.

**PERATURAN BUPATI BURU TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
BUPATI BURU NOMOR 20 TAHUN 2014 TENTANG BIAYA SEWA ALAT BERAT MILIK
PEMERINTAH KABUPATEN BURU**

ABSTRAK : – Pemerintah Kabupaten Buru memiliki alat-alat berat yang dapat digunakan selain untuk kepentingan Pemerintah Kabupaten Buru sendiri juga dapat disewakan kepada pihak ketiga yang mengerjakan pekerjaan konstruksi dan pekerjaan lain milik pemerintah. Peraturan Bupati Buru Nomor 20 Tahun 2014 tentang Biaya Sewa Alat Berat Milik Pemerintah Kabupaten Buru tidak sesuai karena terdapat pembelian alat berat yang baru sehingga perlu dilakukan penyesuaian.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 Tahun 1999; UU No. 46 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 25 Tahun 2000; PERMENPU No. 15 Tahun 2004; PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006; PERMENDAGRI No. 17 Tahun 2007; PERDAKABBURU No. 11 Tahun 2008.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Buru Nomor 20 Tahun 2014 tentang Biaya Sewa Alat Berat Milik Pemerintah Kabupaten Buru, dengan mengubah Pasal 2.

CATATAN : – Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 23 April 2016;
– Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Buru Nomor 20 Tahun 2014 (Berita Daerah kabupaten Buru Tahun 2014 Nomor 20) tentang Biaya Sewa Alat Berat Milik Pemerintah Kabupaten Buru, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan ini;
– Lampiran 1 hlm.

TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA

2016

PERBUP BURU NO. 40, BD. 2016/NO. 40 : 12 HLM.

PERATURAN BUPATI BURU TENTANG TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA

- ABSTRAK :**
- Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa. Pengadaan Barang/Jasa ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Desa dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa di desa.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 46 Tahun 1999; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 106 Tahun 2000; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 43 Tahun 2014; PP No. 60 Tahun 2014; PP No. 6 Tahun 2006; PERPRES No. 54 Tahun 2010; PERMENDAGRI No. 37 Tahun 2007; PERKELKPBJP No. 13 Tahun 2013; PERDAKABBURU No. 12 Tahun 2015; PERDAKABBURU No. 16 Tahun 2015; PERBUPBURU No. 60 Tahun 2015.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Pengadaan Barang/ Jasa di Desa yang selanjutnya disebut dengan Pengadaaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Pemerintah Desa, baik dilakukan dengan cara swakelola maupun melalui penyedia barang/jasa.
- CATATAN :**
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 23 April 2016;
 - Lampiran 5 hlm.

KEPESERTAAN BADAN PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL KESEHATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BURU

2016

PERBUP BURU NO. 46, BD. 2016/NO. 46 : 8 HLM.

PERATURAN BUPATI BURU TENTANG KEPESERTAAN BADAN PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL KESEHATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BURU

- ABSTRAK :**
- Dalam rangka memberikan pelayanan, perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi tenaga kerja yang melakukan pelayanan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja dan pekerja yang bekerja pada pemberi iuran penyelenggara negara diperlukan jaminan sosial melalui Kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No. 1 Tahun 1970; UU No. 7 Tahun 1981; UU No. 3 Tahun 1992; UU No. 13 Tahun 2003; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 40 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 24 Tahun 2011; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 73 Tahun 2005; PP No. 84 Tahun 2013; PP No. 85 Tahun 2013; PP No. 86 Tahun 2013; PERPRES No. 12 Tahun 2013; PERPRES No. 109 Tahun 2013; PERPRES No. 111 Tahun 2013; PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006; PERDAKABBURU No. 02 Tahun 2008.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Kepesertaan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buru, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia yang telah membayar iuran.

- CATATAN :**
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 07 Juni 2016;
 - Pemberian atau perpanjangan izin yang telah diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten sebelum diberlakukannya Peraturan Bupati ini, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BURU NOMOR 17 TAHUN 2016 – TATA CARA PEMBAGIAN – PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN BURU TAHUN ANGGARAN 2016

2016

PERBUP BURU NO. 50, BD. 2016/NO. 50 : 4 HLM.

PERATURAN BUPATI BURU TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BURU NOMOR 17 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN BURU TAHUN ANGGARAN 2016

- ABSTRAK :**
- Ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa, merubah Peraturan Bupati Buru Nomor 17 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2016.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No. 46 Tahun 1999; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 43 Tahun 2014; PP No. 8 Tahun 2016; PERPRES No. 137 Tahun 2014; PERMENDAGRI No. 113 Tahun 2014; PERMENKEU No. 49 Tahun 2016; PERMENDESPEMDATERTRANS No. 21 Tahun 2015; PERDAKABBURU No. 12 Tahun 2015; PERDAKABBURU No. 16 Tahun 2015; PERBUPBURU No. 60 Tahun 2015.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Perubahan atas Peraturan Bupati Buru Nomor 17 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2016, dengan mengubah ketentuan Pasal 8 dan ketentuan Pasal 12.
- CATATAN :**
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 01 September 2016.

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BURU NOMOR 19 TAHUN 2016 – PEDOMAN TEKNIS PENGGUNAAN – PENGELOLAAN DANA DESA DI KABUPATEN BURU TAHUN ANGGARAN 2016

2016

PERBUP BURU NO. 51, BD. 2016/NO. 51 : 5 HLM.

PERATURAN BUPATI BURU TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BURU NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGGUNAAN DAN PENGELOLAAN DANA DESA DI KABUPATEN BURU TAHUN ANGGARAN 2016

- ABSTRAK :**
- Ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa, merubah Peraturan Bupati Buru Nomor 17 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2016.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No. 46 Tahun 1999; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 43 Tahun 2014; PP No. 8 Tahun 2016; PERPRES No. 137 Tahun 2014; PERMENDAGRI No. 113 Tahun 2014; PERMENKEU No. 49 Tahun 2016; PERMENDESPEMDATERTRANS No. 21 Tahun 2015; PERDAKABBURU No. 12 Tahun 2015; PERDAKABBURU No. 16 Tahun 2015; PERBUPBURU No. 60 Tahun 2015.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Perubahan atas Peraturan Bupati Buru Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Penggunaan dan Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2016, dengan mengubah ketentuan Pasal 14, ketentuan Pasal 16, dan ketentuan Pasal 17.
- CATATAN :**
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 02 September 2016.